

INTISARI

Diskursus mengenai korelasi kebijakan desentralisasi dan pengentasan kemiskinan terus berkembang hingga saat ini, khususnya di negara-negara berkembang. Korelasi ini sering dikaitkan dengan tiga pilar pembangunan sosial ekonomi: *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job*. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dalam perdebatan tersebut dengan mengintegrasikan model spasial ekonometri untuk menguji pengaruh enam instrumen kebijakan desentralisasi terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan kumpulan data panel tingkat kabupaten/kota dari 5 wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 2011 dan 2021.

Analisis data spasial eksplorasi menemukan adanya keterkaitan spasial yang positif dan signifikan pada kemiskinan selama periode yang diamati. Studi ini juga menyoroti kluster kemiskinan tinggi yang signifikan yang terletak di daerah perdesaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Analisis Spasial Indikator Lokal. Analisis regresi panel data menunjukkan bahwa instrumen kebijakan *pro-job* memiliki dampak yang lebih signifikan dan cepat dalam mengurangi kemiskinan daripada kebijakan *pro-growth* dan *pro-poor*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *pro-growth* memiliki variasi pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DIY, karena variabel PAD berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan sedangkan variabel dana transfer justru memperburuknya. Peningkatan instrumen kebijakan *pro-poor* yang meliputi belanja sektor pendidikan dan kesehatan didapati akan berpengaruh signifikan pada penurunan kemiskinan di Provinsi DIY. *Pro-job* yang diwakili oleh nilai investasi memiliki nilai yang signifikan dan cukup besar dalam memperbaiki kemiskinan di Provinsi DIY.

Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Desentralisasi, Spasial Ekonometri, Provinsi DIY, Keterkaitan Spasial

ABSTRACT

Discourse on the correlation of decentralization and poverty alleviation policies continues to develop nowadays, especially in developing countries. This correlation is often associated with three pillars of socioeconomic development: pro-growth, pro-poor, and pro-job. This study attempts to contribute to the debate by integrating spatial models of econometrics to examine the effect of six decentralization policy instruments on poverty. This study used a collection of district/city-level panel data from 5 regions in Yogyakarta Special Region Province between 2011 and 2021.

Analysis of exploratory spatial data found positive and significant spatial associations to poverty during the observed period. The study also highlights significant high poverty clusters located in rural areas in the Special Region of Yogyakarta Province using Spatial Analysis of Local Indicators. Panel data regression analysis shows that pro-job policy instruments have a more significant and rapid impact on reducing poverty than pro-growth and pro-poor policies.

The results of this study show that pro-growth policies have a variety of influences on poverty in DIY Province, because the PAD variable has a positive effect on poverty reduction while the transfer fund variable actually exacerbates it. Increasing pro-poor policy instruments, including education and health sector spending, is found to have a significant effect on reducing poverty in DIY Province. Pro-jobs represented by investment value have significant and considerable value in improving poverty in DIY Province.

Keywords: Poverty Alleviation, Decentralization Policy, Spatial Econometrics, DIY Province, Spatial Linkage